PILIHAN DAN PELUANG:
REVOLUSI INDONESIA SETELAH 45 TAHUN
Beberapa Refleksi Pribadi
oleh

Soedjatmoko

Saya merasa dihormati dan gembira telah diminta untuk berbicara dalam simposium ini tentang dekolonisasi Indonesia yang diselenggarakan oleh Roosevelt Study Center. Sebagaimana Anda dapat membayangkannya, tahun-tahun tatkala dekolonisasi ini terjadi adalah sebagian dari masa kehidupan saya yang sangat formatif. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mencegah agar pembicaraan ini tidak menjurus ke suatu latihan nostalgia. Sebaliknya saya berharap bisa menggunakan beberapa pengalaman pribadi saya selama perjuangan kemerdekaan Indonesia untuk menyoroti proses-proses yang pada waktu itu sedang berkembang.

Berkat berbagai studi besar tentang Revolusi Indonesia serta sejumlah catatan pribadi oleh pelaku utama dalam

Disampaikan pada 'Symposion on Decolonisation of Indonesia', Roosevelt Study Center, Middelburg, Nederland, 2 September 1987.-

drama itu, garis-garis besar dari kisah sejarah tentang revolusi Indonesia pada tahun 1940-an sudah dikenal umum. Dalam makalah ini saya beranggapan bahwa Anda sudah mengetahui garis-garis besar tersebut dan saya tidak akan mengunyah kembali peristiwa-peristiwa itu sekali lagi.

Saya bermaksud menempatkan analisa saya tentang kejadian-kejadian itu dalam rangka "Pilihan dan Peluang" (Choices and Circumstances). Kita semua membuat pilihan berdasarkan pandangan kita - persepsi yang diasah oleh pengetahuan kita yang terbatas, oleh nilai, aspirasi, dan keceemasan, oleh perasaan kita mengenai pilihan apa yang tersedia, dan oleh peluang yang sering berada di luar kemampuan atau pengetahuan kita. Hal ini terlebih berlaku di masa revolusi ketika peristiwa-peristiwa yang berlangsung sangat dipercepat dan kegiatan manusia dijiwai oleh emosi dengan intensitas yang besar. Hal tersebut membuat revolusi-revolusi sangat sukar ditentukan arahnya, dengan dinamika internalnya sendiri, malahan lebih sering juga berada di luar pengendalian para pemimpinnya. Lebih daripada yang biasanya terjadi dalam hal umum, kita lalu menyadari bahwa ada pemisahan antara maksud dan sejarah.

Arah pokok dari makalah saya adalah sekadar ikhtiar untuk memperlihatkan apa yang terjadi dengan revolusi Indonesia - mulai dari frustrasi yang mendalam dan kondisi yang tidak menentu dari pergerakan kebangsaan pada akhir

masa pemerintahan Belanda, melalui pertumbuhan suatu tekad selama pendudukan Jepang, sampai pecahnya revolusi dan akhirnya lahir sebuah polity yang kohesif dan dinamis yang tidak bisa lagi diremehkan dalam pentas dunia.

Selama revolusi Indonesia berjalan ada sejumlah pilihan yang sangat penting yang harus ditentukan - dan umumnya pilihan-pilihan itu harus dihadapi dalam konteks suatu perangkat peluang dalam suasana yang khusus. Pilihan cenderung ditentukan, lebih sering daripada yang diduga, oleh kita sendiri; umumnya suasana diciptakan di luar wilayah tanggung jawab individual - dan kenyataan ini lebih-lebih lagi dirasakan dalam suasana perubahan geopolitik yang dahsyat yang bergelora di atas lahan tektonis politik dan kultural Asia Tenggara pada paruh pertama dalam tahun 1940-an.

Tiga kondisi yang sangat menentukan bagi Indonesia, menurut keyakinan saya, adalah sebagai berikut:

(1) Keruntuhan yang cepat dari kekuasaan Belanda di Indonesia ketika menghadapi kemajuan Jepang pada tahun 1941-42. Bagi banyak orang Indonesia hal ini telah menghancurkan kredibilitas Belanda sebagai penguasa kolonial kami maupun keabsahan klaim mereka terhadap wilayah yang sudah hilang itu se usai perang. Hal ini pula memperkuat himbuan yang agak tersebar luas untuk bekerjasama dengan Jepang pada masa awal perang.

(2) Kekecewaan kemudian terhadap tentara pendudukan Jepang serta bertumbuhnya perasaan anti-Jepang dari mana gerakan kebangsaan Indonesia semakin banyak mampu menarik dukungan dan kekuatannya. Dalam kekejaman dan kebengisannya, resim Jepang telah mendorong banyak di antara kami supaya memper-tabah diri untuk menghadapi perjuangan yang akan datang.

(3) Keputusan yang diambil bahwa tentara Sekutu yang akan membebaskan Indonesia pada akhir perang adalah Inggris - tentara yang karena nasib perang atau apapun juga sama sekali tidak memiliki sarana untuk menghadapi emosi yang meluap di Indonesia pada masa sesudah Jepang menyerah. Keterangan terinci tentang mengapa tindakan itu diambil adalah suatu kisah yang berbelit-belit yang sebaiknya di-serahkan kepada sejarawan Perang Dunia II saja. Akan tetapi agaknya hal itu didasarkan atas suatu keputusan yang diambil pada awal 1945, tak lama sebelum Konperensi Yalta, oleh Kepala-kepala Staf Angkatan Bersenjata Inggris dan Amerika. Keputusan ini akan membagi-bagi tanggung jawab militer di Asia: tentara Amerika, di bawah pimpinan MacArthur, akan diberi keleluasaan untuk bergerak maju ke utara, ke negeri Cina, Jepang dan diharapkan akan bertemu dengan tentara Rusia; kekuatan Inggris, di bawah Mountbatten, akan tidak dihalangi untuk bergerak ke selatan. Mengenai keputusan ini sejarawan Herbert Feith mengamati bahwa

"Ini mempengaruhi cara dan waktu saat dilaksanakan

kemudian perebutan kembali Singapura dan Negeri-negeri Persekutuan Melayu, pendudukan kembali Hindia Timur, dan kembalinya Prancis ke Indo-cina."

Dalam proses analisa ini saya ingin mengingat kembali sejumlah diskusi yang telah saya lakukan dengan beberapa pemimpin revolusi Indonesia. Saya suka berpikir bahwa hal ini akan membantu memberi tambahan keterangan mengenai kejadian-kejadian sesudahnya, mengenai latar belakang sejarahnya dan maknanya untuk jangka waktu yang lebih panjang. Saya juga mau mengharapkan bahwa hal tersebut bisa menambah pemahaman mengenai bukan saja revolusi Indonesia, tetapi juga tentang proses-proses revolusioner yang masih merupakan bagian yang begitu besar dan dilema yang begitu rumit dari dunia modern kita.

Sementara saya diminta untuk berbicara di hadapan Anda tentang perkembangan pergerakan kebangsaan Indonesia pada tahun 1940-an, saya merasa bahwa dengan hanya menceklek sejarah liwat dekade-dekade kalender mungkin bukanlah merupakan suatu cara bertutur yang paling memperjelas permasalahannya. Banyak di antara isyu dalam revolusi Indonesia, misalnya, akan memperoleh makna yang jauh lebih besar jika dilihat di dalam jangka yang agak lebih luas yang juga melibatkan kejadian-kejadian pada tahun 1950-an.

Teristimewa saya bermaksud dalam renungan ini untuk

membuat beberapa perbandingan dengan periode sejak tahun 1958 - yang boleh disebut penghidupan kembali dari revolusi - sesudah mengalami suatu selingan pemerintahan demokratis pada masa pasca-revolusi Indonesia.

Tetapi, sebelum melangkah lebih lanjut, saya harus melukiskan dulu keadaan menguntungkan saya yang khusus dalam peristiwa-peristiwa ini, dan juga bias pribadi saya. Pada waktu perang Pasifik mulai saya masih mahasiswa kedokteran tingkat dua, berusia awal duapuluhan tahun. Saya mempunyai tiga mentor politik yang pada tingkat berbeda-beda dan dengan cara yang berbeda-beda pula telah mempengaruhi perspektif politik saya.

Yang pertama di antara mereka adalah Amir Syarifudin yang saya mengenal singkat pada awal pendudukan Jepang sebelum ia dipenjarakan dan dianiaya oleh militer Jepang. Sesudah ia dibebaskan dari penjara pada akhir perang dan diangkat sebagai Menteri Penerangan dalam kabinet Indonesia yang pertama, ia mengundang seorang teman mahasiswa, Soedarmo Sastrosatomo, dan saya sendiri untuk membantunya dalam membentuk sebuah seksi hubungan internasional di kementeriannya dengan tugas khusus untuk melayani pers asing.

Kami menerbitkan sebuah harian dalam bahasa Inggris, Independent (dengan bantuan beberapa jurnalis/serdadu Ing-

?k

gris yang mau menambah penghasilannya), dan sebuah mingguan dalam bahasa Belanda, Het Inzicht, dengan maksud untuk terus menerus mengadakan kontak dan dialog sementara perundingan dan pertempuran berlanjut.

Banyak diskusi yang tajam dan mendalam yang saya lakukan dengan Amir Syarifudin, seorang yang berpengetahuan luas, dengan kehangatan dan pesona pribadi yang besar sekali. Meskipun berasal dari keluarga Muslim ia telah masuk agama Kristen. Diskusi kami teristimewa berkisar tentang peri bagaimana ia dapat mendamaikan penghayatan kekristenannya yang sangat mendalam dengan pandangan-pandangannya tentang Marxisme yang juga sangat mendalam. Dari percakapan saya dengan beliau, muncullah wawasan yang telah menolong saya untuk membentuk banyak dari keyakinan saya sendiri yang telah menjadi penuntun dalam kehidupan saya di kemudian hari.

Sukarno adalah mentor saya yang kedua. Landasan dari suatu hubungan yang lama sekali pada waktu mana kami mendiskusikan masalah-masalah revolusi, Marxisme, mistik Jawa, tujuan nasional dan politik internasional, telah diletakkan pada suatu pertemuan yang ribut pada tahun 1943 ketika, bersama dua teman mahasiswa lainnya, kami mengadakan suatu sit-in di rumah Sukarno dan kurang lebih memaksakannya untuk berdiskusi dengan kami yang berlangsung beberapa jam. Saya akan kembali ke peristiwa ini dalam uraian saya

nanti.

Mentor saya yang ketiga adalah Sutan Syahrir, Perdana Menteri Indonesia yang pertama sesudah merdeka. Ia mengajar saya bahwa tidak perlu adanya kontradiksi antara seorang revolusioner yang terlibat total dan seorang demokrat, seperti juga antara seorang sosialis dan humanis.

Sebagian karena saya juga diperbantukan di kantor Perdana Menteri, saya mendapat keleluasaan untuk bisa bergerak bebas di kalangan banyak pemimpin revolusi, tentu termasuk di antaranya Wakil Presiden Hatta. Saya kira saya menikmati kebebasan gerak ini juga karena saya masih terlalu muda untuk menjadi suatu ancaman - saya berumur 23 tahun pada awal revolusi - dan juga tidak mempunyai, bahkan tidak berkepentingan untuk mempunyai suatu dukungan kekuatan (power base) sendiri. Hal ini memungkinkan saya boleh mengikuti sejumlah perundingan rahasia antara pemimpin-pemimpin itu dan, dalam beberapa kasus, menjadi perantara bagi mereka.

Dari pengalaman saya waktu itu, dan sekarang dengan menoleh ke belakang setelah menyaksikan berbagai macam bentuk dekolonisasi, saya tiba pada perasaan bahwa proses pertumbuhan Indonesia dalam mencapai kedudukannya sebagai bangsa dan negara yang merdeka, pada dasarnya dapat dikategorikan oleh serangkaian pilihan yang harus dibuat baik

pada tingkat individu maupun secara kolektif.

Kolaborasi Atau Tidak ?

Salah satu pilihan penting ialah apakah akan diadakan kerjasama dengan penguasa Jepang atau tidak. Pada masa awal perkembangan pergerakan kebangsaan telah muncul persoalan apakah kami akan bekerjasama dengan penguasa kolonial Belanda atau tidak. Pemisahan antara koperator dan non-koperator telah melintasi sebagian besar dari sejarah pergerakan kebangsaan. Tetapi pada waktu itu konteks pada dasarnya politis saja. Sewaktu perang konteksnya adalah suatu konflik militer yang melanda seluruh dunia yang dilihat oleh nasionalisme pada masa kolonial dalam hubungan yang agak berbeda daripada dualisme demokrasi-fasisme.

Bagi orang Indonesia pendudukan Jepang bukan berarti suatu peralihan belaka dari satu pemerintahan kolonial ke yang lain. Kekalahan Belanda terhadap Jepang dilihat sebagai kehancuran suatu sistem kekuasaan dalam keseluruhannya. Bertentangan dengan Belanda, Jepang pada mulanya berusaha mendapatkan dukungan rakyat untuk resimnya liwat himbauan sentimen kebangsaan. Tetapi sesudah beberapa minggu, Jepang membubarkan semua partai politik dan menghibau, mengembangkan serta mencoba memanfaatkan suatu perasaan Asianisme yang laten, dengan cara menghindari

masalah kemerdekaan Indonesia dan menghindari sekelompok permasalahan yang bersifat ideologis.

Melalui kerjasama dengan Sukarno dan Hatta mereka mendirikan organisasi-organisasi massa yang lambat laun, ketika keadaan perang semakin memburuk, makin lama makin dikuasai secara langsung oleh Jepang sendiri. Melalui sejumlah organisasi pemuda diadakan usaha besar-besaran untuk mengindoktrinasi generasi muda yang tidak pernah mengalami pengaruh kolonial Belanda dan yang akan membawa akibat jangka panjang dalam kebudayaan politik Indonesia. Mereka juga mengangkat pegawai-pegawai Indonesia pada tingkat kedudukan administrasi yang lebih tinggi. Kesemuanya ini berbeda sekali daripada apa yang kami alami dalam pemerintahan gaya Belanda. Pendudukan Jepang menciptakan seperangkat kondisi yang secara luar biasa memperkuat potensi untuk revolusi Indonesia.

Pemerintah Jepang lah yang, umpamanya, melarang penggunaan bahasa Belanda dan dengan demikian memaksakan elite Indonesia untuk berbicara bahasa Indonesia. Dengan berbuat demikian Jepang membantu mengurangi jarak sosial yang besar yang pernah ada di bawah resim kolonial Belanda antara elite Indonesia dan massa penduduk desa biasa. Tindakan ini juga menjurus ke suatu perkembangan yang pesat sekali dari bahasa Indonesia yang menjadi bahasa modern untuk komunikasi yang lebih luas, dan terjadi pula suatu ledakan

kegiatan kultural dan kreativitas kesusastraan.

Diusahakan pula oleh Jepang - lagi-lagi bertentangan dengan dasar politik kolonial Belanda - untuk memobilisasi dukungan kaum Muslimin. Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) menjadi wahana bagi partisipasi Muslim. Tindakan ini telah meletakkan dasar untuk kegiatan politik Islam yang diselenggarakan bersama-sama yang nanti akan menjadi suatu kekuatan politik utama selama revolusi kemerdekaan, dan menjadikan pemimpin mereka bagian dari elite Indonesia, sekali lagi sangat bertentangan dengan policy kolonial Belanda.

Jadi pendudukan Jepang turut membantu meletakkan dasar bagi sebuah polity Indonesia yang tunggal. Di bawah pemerintahan Belanda tujuan demikian berada di luar jangkauan para pemimpin kebangsaan. Meskipun bagian-bagian lain dari bekas wilayah Hindia-Belanda berada di bawah pemerintahan militer yang berbeda dan tidak banyak menikmati kebebasan seperti halnya pergerakan kebangsaan di Jawa, perkembangan suatu pergerakan massa dengan dasar yang luas di Jawa yang berbicara atas nama seluruh bangsa Indonesia, terbukti sangat penting dan sangat menentukan bagi seluruh Indonesia.

Sukarno melihat revolusi dalam konteks kolaborasi dengan penguasa Jepang. Perkenankan saya di sini untuk beralih kembali ke masa permulaan dari hubungan kami, sejak

saya datang ke rumahnya pada tahun 1943 bersama dua rekan mahasiswa, Soedarpo dan Soebadio. Kami bertiga merupakan bagian dari sebuah kelompok yang relatif kecil di Indonesia yang pada waktu itu menolak untuk bekerjasama dengan pemerintah pendudukan, dan kami telah memutuskan untuk menantang Sukarno, pemimpin pergerakan kebangsaan, mengenai keputusannya untuk bekerjasama dengan Jepang.

Sesudah kami diberitahu bahwa Sukarno tidak bisa menerima kami, kami memutuskan untuk menunggu saja. Ketika akhirnya ia keluar, ia agak marah dan bertanya apa yang dikehendaki kami. Saya menyadari bahwa bagaimana pun juga kami harus segera menangkap perhatiannya apabila kami masih berharap untuk mengadakan diskusi dengan beliau. Untuk bisa menarik perhatiannya saya berkata dalam bahasa Belanda - pada waktu itu bahasa terlarang. Saya berkata kepada Sukarno:

"Bung, kami datang untuk melepaskan kesetiaan kami terhadapmu."

Ucapan ini rupanya berhasil, dan ia mempersilakan kami masuk ke dalam tempat kami berdiskusi berjam-jam lamanya. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1943, belum lama setelah pertempuran Guadalcanal, yaitu pertempuran yang menurut hemat saya merupakan pertanda dari kekalahan Jepang pada akhirnya.

Saya bertanya kepadanya mengapa ia menganjurkan kola-

borasi. Kata beliau, karena mereka menjanjikan kita tiga hal yang Belanda tidak pernah bersedia untuk dirundingkan: Nomor satu, parlemen; nomor dua, tentara; dan nomor tiga, kemerdekaan. Saya menjawab bahwa janji demikian tidak akan ditepati oleh Jepang. Paling banyak kita akan diberi pseudo-parlemen, peran pembantu terhadap tentara Jepang, dan suatu kemerdekaan semu. Sesudah beberapa jam berdebat dengan keras, Sukarno berkata supaya kami datang kembali setelah lima tahun - jika semua masih hidup - dan akan kita lihat siapa yang benar! Peristiwa ini adalah permulaan dari suatu hubungan pribadi yang hangat tetapi juga sering penuh pertengkaran yang berlanjut sampai 1958 ketika beliau memutuskan hubungan ini.

Saya menceritakan kisah ini bukan untuk mengklaim bahwa saya sudah tahu sebelumnya jalan mana yang tepat bagi Indonesia pada waktu itu. Sebagaimana Barbara Tuchman mengatakan dalam The Guns of August, "honour wears different coats to different eyes" (kehormatan mengenakan jubah yang berbeda bagi mata yang berbeda). Apa yang hendak saya katakan di sini adalah untuk menunjukkan pilihan - dan kondisi - yang dihadapkan kepada kami semua dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pilihan saya adalah untuk menolak gagasan kolaborasi dengan tentara pendudukan. Sukarno memilih jalan yang berlawanan. Andaikan ia memutuskan untuk tidak berkolaborasi, apakah kerugian bagi pergerakan

kebangsaan Indonesia akan jauh lebih besar ?

Seperti yang telah terjadi, biaya kolaborasi ini sangat tinggi. Misalnya, se usai perang beberapa segmen penduduk menunjukkan kemarahannya terhadap pembesar lokal Indonesia yang terlibat dalam pengerahan tenaga kerja paksa dan penyerahan beras secara paksa selama pendudukan Jepang. Banyak di antara pegawai lokal ini, baik di Jawa maupun di Sumatra, dibunuh oleh sesama rakyatnya yang murka.

Saya yakin bahwa adalah salah untuk menghukum Sukarno, seperti beberapa orang telah mencoba melakukannya, kalau ia berkolaborasi karena kepribadiannya lemah. Namun, kolaborasi tetap menghadapkan kami dengan suatu masalah etika yang sulit. Apakah kolaborasi ini benar-benar demi kepentingan pergerakan kebangsaan? Sudah jelas bahwa masalah ini merupakan sesuatu yang sangat mencekamnya - umpamanya, peranan Sukarno dalam menyediakan tenaga romusya untuk melayani Jepang di luar Indonesia. Seperti kata J.D. Legge tentang keputusan Sukarno untuk berkolaborasi, "Sebagaimana halnya dengan begitu banyak pilihan tentang tujuan dan cara untuk mencapainya, masalahnya adalah menerima seluruhnya atau tidak sama sekali" (Like so many choices about ends and means, it was all or nothing).

Pada dasarnya Sukarno melihat Sekutu sebagai musuh yang nyata. Kerjasama dengan Jepang dapat dimanfaatkan

untuk disesuaikan dengan cita-cita kebangsaan Indonesia. Selama jangka waktu yang lama, sebagaimana pertemuan kami dengan beliau pada tahun 1943 dan juga kejadian-kejadian kemudian telah menunjukkan, ia yakin bahwa Jepang akan menang. Baginya kolaborasi pertama-tama merupakan suatu pilihan strategis.

Tak perlu diragukan lagi bahwa keputusan Sukarno ini menguntungkan bagi tentara pendudukan Jepang. Bersamaan dengan itu ia membenarkan tindakannya dengan alasan bahwa ia melayani kepentingan jangka panjang dari nasionalisme Indonesia. Ia melihat dirinya sebagai seorang yang bekerjasama dengan penyerang sementara, suatu pilihan yang pada akhirnya akan berguna bagi cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Sekarang dengan memiliki kemampuan untuk menoleh ke belakang, kita bisa melihat bahwa peranan Sukarno selama pendudukan Jepang adalah sangat penting dalam mempersiapkan revolusi Indonesia. Hal ini memberinya kemungkinan untuk meletakkan dasar bagi sejumlah unsur kunci dalam perjuangan kemerdekaan.

Lihat kerjasama dengan tentara pendudukan ia mendapat jalan masuk ke jalur-jalur komunikasi - sampai ke tingkat bawah di pedesaan - suatu hal yang tidak pernah dinikmatinya sebelumnya. Walaupun jalur ini dimaksudkan untuk menyampaikan keinginan-keinginan Jepang, dalam praktek Sukarno memanfaatkannya untuk menyampaikan pula gagasan-gagasannya sen-

diri.

Pembentukan kekuatan militer sukarela - PETA, walaupun Jepang membubarkannya beberapa hari sesudah Kemerdekaan diproklamasikan - merupakan sebuah langkah lain yang sangat vital dalam pertempuran yang terjadi kemudian melawan Belanda. Dan pembentukan suatu sistem yang terdiri dari dewan-dewan lokal memungkinkan suatu kerangka bagi pemerintahan lokal di kemudian hari.

Tetapi barangkali yang paling penting adalah bahwa Sukarno telah membangkitkan kesadaran pemuda dan menjadikan mereka suatu kekuatan yang sangat diperlukan dalam kemerdekaan. Dengan segala indoktrinasi yang mereka terima, dan segala sikap militan mereka yang kadang kala tanpa menggunakan akal, pendudukan Jepang memang telah mendorong pemuda Indonesia untuk menyadari akan masanya yang tidak berketentuan - suatu visi yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh banyak di antara mereka. Dalam prosesnya, dan saya berbicara sebagai seorang yang pada waktu itu juga pemuda, kami memperoleh pemahaman tentang kemungkinan-kemungkinan yang ada pada kami untuk membentuk masa depan. Kesemuanya ini membuat Indonesia pada tahun 1945 sebuah kesatuan sosial yang amat berlainan daripada tahun 1930-an - ketika kekuatan Belanda dianggap begitu mapan.

Dengan cara demikian dan cara-cara lainnya Sukarno

turut menciptakan sebuah polity yang baru - suatu polity yang rela untuk mengesampingkan perbedaan-perbedaan demi kepentingan untuk menjadi, akhirnya, satu bangsa. Karena alasan-alasan ini semuanya bagi saya tidak begitu sulit untuk - kini sesudah 45 tahun kemudian - melihat banyak pembenaran dalam pilihan Sukarno untuk berkolaborasi dengan Jepang pada tahun 1942, meskipun banyak alasan-alasannya untuk bertindak demikian telah terbukti salah. Saya juga tidak ada kesulitan apa pun untuk melihat pembenaran dari peran mereka yang tidak mau berkolaborasi, sebab mereka tetap mempertahankan dan memupuk rasa tanggungjawab dari sebagian pergerakan kebangsaan yang anti-fasis, anti-feodal, dan yang mendambakan demokrasi.

Anti-Jepang Atau Netral: Bagaimana Mengumumkan Kemerdekaan?

Pada akhir masa perang sentimen anti-Jepang telah menjalar hampir ke seluruh masyarakat Indonesia.

Sementara perang menghadapi akhirnya, di musim panas tahun 1945, keadaan ini menghadapkan Sukarno dengan suatu pilihan yang lain: haruskah ia percaya bahwa janji-janji pemerintah Jepang tentang deklarasi kemerdekaan akan ditepati jika Jepang kalah, atau haruskah ia mengabaikan Jepang dan secara terpisah berani mengumumkan proklamasi ?

Sukarno sendiri masih tetap percaya akan janji-janji

militer Jepang. Akan tetapi ia mendapat tekanan dari dua belah pihak. Pertama dari pihak Syahrir - yang bersama pengikut-pengikutnya tegas menentang kalau kemerdekaan akan diberikan sebagai "hadiah" Jepang. Ia menginginkan kemerdekaan yang anti-Jepang dan anti-fasis, dan sebenarnya telah diadakan suatu upaya untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus. Tekanan kedua berasal dari kaum pemuda yang tidak begitu mementingkan ideologi, tetapi menginginkan suatu keberanian untuk mengumumkan kemerdekaan.

Akhirnya walaupun terjadi "penculikan" oleh pemimpin pemuda di waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945 - untuk meyakinkan Sukarno agar supaya menempuh jalan yang berani - ia memilih jalan tengah: sebuah pengumuman kemerdekaan yang singkat yang tidak mengandung kata-kata anti-Jepang seperti yang dianjurkan Syahrir, maupun tidak menyatakan keinginan untuk segera merebut kekuasaan seperti yang dikehendaki pemimpin-pemimpin pemuda. Ada beberapa uraian yang berbeda mengenai kemungkinan betapa besar pengaruhnya "penculikan" ini terhadap keputusan Sukarno - mulai dari pernyataan Sukarno sendiri bahwa peristiwa itu tidak ada pengaruhnya, sampai pada ungkapan Adam Malik yang mengatakan bahwa tanpa penculikan tidak akan ada proklamasi.

Setelah tentara Inggris mendarat, disusul oleh pegawai administrasi Belanda yang mengikuti mereka dari belakang, ada kekhawatiran yang semakin besar bahwa Sukarno mungkin

akan ditangkap sebagai kolaborator atau penjahat perang oleh Sekutu. Sementara itu nyata pula bahwa, di mata rakyat Indonesia, Sukarno adalah pemimpin revolusi yang sejati dan bahwa soal keamanannya merupakan masalah nasional yang penting sekali. Oleh sebab itu ia berpindah ke suatu tempat yang tidak diumumkan di pedalaman Jawa, meninggalkan Hatta sebagai pejabat presiden.

Selama kepergiannya Komite Nasional Pusat memutuskan untuk mengubah sistem pemerintahan dari sistem presidentil ke suatu sistem parlementer dengan kabinet bertanggungjawab kepada Komite Nasional Pusat sebagai pendahulu dari sebuah parlemen yang terpilih. Dengan restu Mohammad Hatta dibentuklah sebuah kabinet baru, terdiri dari mereka yang tidak dianggap sebagai kolaborator dengan Jepang, dengan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Tetapi kabinet pertama tidak bersedia mengundurkan diri, sebab mereka tidak mengakui keabsahan dari perubahan itu. Bersama teman saya, Soedarpo, kami diutus oleh kabinet Syahrir untuk mencari Sukarno dan membawanya ke Jakarta secepat mungkin agar supaya ia dapat mengambil keputusan tentang kabinet yang mana yang harus memerintah. Ketika Sukarno datang kembali, ia menyuruh kedua kabinet itu berjajar saling hadap-menghadapi di rumahnya dan, tanpa banyak bicara, memutuskan bahwa kabinet Syahrir lah yang mulai saat itu merupakan kabinet yang sah. Di sini nampak lagi ironi keadaan yang mendorong

Sukarno untuk memilih sebuah kabinet yang terdiri dari non-kolaborator.

Berunding Atau Bertempur ?

Pada waktu tentara Inggris tiba pada musim gugur 1945, mereka menemukan sebuah pemerintah yang telah berfungsi dan yang siap untuk diakui kemerdekaannya. Ketika menjadi jelas bahwa, di belakang tentara Inggris, Belanda berusaha untuk menegakkan kembali kekuasaannya, maka pertempuran mulai di beberapa tempat dengan Surabaya sebagai medan tempur yang paling berdarah selama revolusi.

Beberapa hari sesudah beliau menjadi Perdana Menteri saya bertanya kepada Sutan Syahrir mengapa ia menganggap jalan perundingan sebagai sesuatu yang esensial. Jawabnya ialah bahwa tujuan terakhir baginya adalah pengakuan internasional tentang pernyataan kemerdekaan yang meliputi wilayah bekas Hindia-Belanda. Ini berarti pengakuan Republik Indonesia sebagai negara, dengan sebuah pemerintahan yang memiliki segala atributnya. Tetapi tujuannya yang segera harus dicapai adalah untuk menghindari bahwa Inggris membawa masuk pasukan tambahan. Sementara itu pertempuran bisa dan harus diteruskan.

Syahrir berpendapat bahwa orang Inggris seharusnya bukan musuh kami dan bahwa kami harus menjaga agar mereka

tidak menjadi musuh. Begitu tentara Inggris berangkat, kami bisa berurusan dengan Belanda meskipun ada kesenjangan dalam kekuatan militer. Ia beranggapan bahwa Inggris justru harus dipakai untuk menjamin adanya suatu penyelesaian sebagai hasil perundingan yang melibatkan pihak ketiga dengan bantuan internasional. Akan tetapi, sementara itu policy demikian tidak menghalangi tindakannya pertama dalam kedudukan sebagai Perdana Menteri untuk menyatakan solidaritasnya dengan penduduk Surabaya dalam pertempuran yang tidak seimbang itu.

Segera sesudahnya terjadi peristiwa lain yang mengakibatkan suatu pernyataan lebih lanjut mengenai strategi Realpolitik Syahrir. Pada akhir bulan November seorang koresponden perang bangsa Amerika, dari majalah Newsweek, Harold Isaacs, tiba di Jakarta dari Indocina dengan membawa surat dari Ho Chi Minh kepada Wakil Presiden Hatta yang pernah bertemu dengan pemimpin Vietnam itu di Eropa bertahun-tahun sebelumnya dalam sebuah pertemuan Liga Anti-Imperialis. Dalam suratnya Ho menyarankan agar kedua revolusi ini diadakan terpadu. Hatta meneruskan surat ini kepada Syahrir.

Ketika kemudian saya bertanya kepada Syahrir tentang jawabannya, ia berkata - yang mengejutkan dan mengecewakan saya bukan kepalang - bahwa ia tidak akan menanggapi surat itu. Ia bermaksud akan membiarkan surat itu begitu saja.

Saya bertanya kepadanya: "Mengapa? - apakah ini bukan pengkhianatan terhadap Revolusi Asia?"

Syahrir lalu berkata sebagai berikut: Selama kita bisa membuat Inggris agar tidak menambah pasukan mereka, kita akan menang dalam perjuangan kita. Belanda tidak berada dalam posisi untuk mengadakan perang yang berlarut-larut. Mereka negara kecil, dan biarpun mereka bisa menangkan banyak pertempuran, selama potensi militer kita tidak dihancurkan sama sekali, kita akhirnya akan berjaya.

Tetapi Vietminh-nya Ho Chi Minh, kata beliau, dihadapkan dengan situasi yang sama sekali berbeda. Prancis, meskipun sudah kalah dalam medan pertempuran di Eropa, masih merupakan kekuatan militer utama. Lagi pula, katanya, pergerakan kebangsaan kita dipimpin oleh kaum nasionalis - mereka oleh komunis. Oleh sebab itu mereka harus menghadapi lebih banyak musuh daripada kita. Ini berarti bahwa kita akan mencapai kemerdekaan lebih cepat daripada orang Vietnam. "Dan sekali kita telah menjadi bangsa yang merdeka, kita bisa membantu mereka dengan lebih efektif daripada yang kita bisa lakukan sekarang."

Saya masih ingat betapa kecewa saya pada waktu itu - saya merasakan suatu tindakan pengkhianatan yang mendalam. Tetapi sudah tentu Syahrir akhirnya terbukti benar. Kecuali dalam satu hal: pada waktu kemerdekaan Indonesia

diakui, ia tidak lagi berkuasa dan pemerintah pada waktu itu mempunyai prioritas yang lain - di antaranya suatu politik luar negeri yang lebih banyak berorientasi kepada Amerika Serikat.

Syahrir, tentu saja, tidak dapat mengatakan kepada umum alasan-alasan mengenai strateginya untuk berunding. Sementara itu ada tekanan terus menerus terhadapnya - baik dari pihak militer maupun dari kaum politikus - untuk mengadakan serangan militer dan untuk mencari penyelesaian secara militer dalam menghadapi Belanda.

Maka tibalah suatu saat pada tahun 1946 ketika Syahrir menyetujui bahwa tentara hendaknya diberi kesempatan untuk menguji kekuatannya dan melancarkan sebuah ofensif umum. Akan tetapi hal ini tidak membawa hasil militer yang besar dan sebagai akibatnya banyak tekanan dari pihak militer supaya menentang perundingan menjadi berkurang. Sementara itu efektifnya perundingan tergantung kepada kemampuan untuk membeli dan menyelundupkan senjata dan amunisi sambil menembus blokade Belanda, maupun kepada kemampuan memperoleh pengakuan internasional terhadap kemerdekaan kami dari sebanyak mungkin negara. Tujuan pertama pada mulanya menemukan sukses, tetapi menjadi lebih sulit pada masa kemudian. Akhirnya, pada waktu Perjanjian Meja Bundar ditandatangani kami hampir tidak lagi mempunyai amunisi.

Langkah penting untuk mencapai tujuan kedua adalah

hasil sebuah pertemuan antara Wakil Menteri Luar Negeri dalam kabinet Syahrir, H. Agus Salim, dengan Brigadir I.C.A. Lauder, Kepala Staf AFNEI, pada akhir bulan November 1945. Pada pertemuan itu Inggris menyetujui bahwa pemerintah Republik Indonesia akan memikul tanggungjawab atas perlucutan senjata 35,000 pasukan Jepang dan atas pengangkutan mereka maupun sejumlah 28,000 tawanan dari pedalaman ke wilayah yang dikuasai Sekutu. Tugas sulit ini dipercayakan oleh pemerintah Indonesia kepada sebuah unit yang dibentuk khusus, yaitu POPDA, dikepalai oleh Brigadir Jenderal Abdulkadir.

Langkah lain untuk tujuan yang sama, adalah tawaran Syahrir, juga dalam bulan November 1945, untuk mengirim beras ke India yang sedang dilanda bencana kelaparan, meskipun panen besar di Jawa Barat itu diperlukan juga di bagian-bagian lain di pulau Jawa. Tawaran ini adalah sesuatu yang bagi Inggris tidak mungkin ditolak, sehingga 500,000 ton beras diangkut ke pelabuhan yang dikuasai Sekutu dalam mobil-mobil truk yang disediakan oleh Inggris.

Tujuan kedua ini, yaitu untuk memperoleh pengakuan internasional, juga memerlukan pembukaan beberapa kantor perwakilan R.I. di Singapura, New Delhi, Kairo, Canberra, dan London yang dibiayai dengan berbagai macam hasil produksi dari Jawa dan Sumatra melalui penerobosan blokade. Usaha-usaha ini mengakibatkan, sesudah Perjanjian Linggar-

jati dan pengakuan Republik secara de facto oleh Inggris pada tanggal 21 Maret 1947 dan oleh Amerika Serikat pada tanggal 23 April 1947, juga pengakuan de jure oleh Mesir, Irak, Afghanistan dan Arab Saudi. Misi Indonesia ke Dewan Keamanan yang dibentuk sesudah aksi militer pertama, dibiayai oleh hasil dari produksi yang dibeli oleh perusahaan dagang Amerika Stein Hall, dan diangkut oleh "Martin Behrman" dari perusahaan pelayaran Amerika Isbrandtsen Line, menantang blokade Belanda.

Strategi Syahrir untuk berunding membuatnya juga bersikeras agar mendapatkan klausul tentang arbitrase dalam setiap persetujuan yang dicapai dengan Belanda. Ini menunjukkan keyakinannya bahwa prioritas pertama bagi Republik haruslah suatu pengakuan internasional.

Dalam perundingan-perundingan yang dilakukan kemudian di Linggarjati mengenai kemerdekaan Indonesia, nampaknya persetujuan tidak mungkin dicapai karena Belanda tidak mau menerima klausul arbitrase tersebut. Delegasi Belanda memohon dengan sangat kepada Sukarno supaya menyetujui tuntutan mereka dan sesudahnya klausul tersebut dikeluarkan.

Ketika Syahrir diberitahu oleh delegasi Belanda mengenai hal ini, ia menghadap Sukarno, mengancam akan mengundurkan diri dan mengatakan bahwa biarlah dia, Sukarno, meneruskan perundingannya saja. Kemudian Sukarno mengubah posisinya. Akibatnya adalah dimasukkannya Klausul 17 dalam Per-

janjian Linggarjati. Inilah salah satu sebab utama mengapa kasus Indonesia bisa dibawa ke hadapan Dewan Keamanan setelah Belanda mulai lagi aksi militernya sesudah mereka menandatangani perjanjian itu.

Akan tetapi hendaknya juga dikemukakan bahwa Dewan Keamanan dengan berhati-hati menghindari suatu pernyataan yang membenarkan keputusan-keputusannya dalam masalah Indonesia berdasarkan klausul arbitrase ini.

Pilihan Antara Satu Atau Multi Partai

Salah satu ciri yang paling unik dari Revolusi Indonesia adalah pembentukan sistem politik yang multi partai di tengah-tengah gelora revolusi. Hal ini sangat menyolok terlebih jika dibandingkan dengan sistem satu partai di banyak negara lain yang baru mengadakan revolusi. Jalan Indonesia ke suatu sistem multi partai di masa revolusi agaknya berliku-liku. Sukarno menginginkan bahwa Republik Indonesia merupakan negara satu partai. Peralihan ke sistem multi partai pertama-tama memerlukan bahwa Komite Nasional Pusat mengubah dirinya dari sebuah badan eksekutif menjadi legislatif, dan memerlukan pula pembentukan suatu sistem quasi-parlementer dengan kabinet yang bertanggungjawab kepada Komite Nasional Pusat yang merintis suatu parlemen hasil pemilihan umum.

Partai nasional tunggal yang didirikan Sukarno hampir segera sesudah proklamasi kemerdekaan, dimaksudkan sebagai perwujudan dari dan sebagai wahana satu-satunya bagi Revolusi Indonesia. Dalam iklim yang serba tidak menentu dan penuh keragu-raguan tentang kekuatan posisi Sukarno-Hatta dan tentang kemampuan mereka untuk memberi kepemimpinan dalam revolusi, terutama di kalangan kaum pemuda, banyak pemimpin muda dalam Komite Nasional Pusat menghendaki penggantian pimpinan. Tujuan yang nyata adalah bahwa beberapa di antara mereka mau mendesak supaya menjadi ketua dan wakil ketua dari Komite Nasional Pusat, untuk kemudian diserahkan kepada Sutan Syahrir dan Amir Syarifudin. Bagi pemimpin-pemimpin muda ini tindakan demikian merupakan langkah pertama ke arah pelaksanaan testamen Sukarno. Yang disebut testamen Sukarno ini adalah hasil dari sebuah pertemuan antara Tan Malaka dengan Sukarno ketika Tan Malaka mengingatkan akan kedudukan Sukarno dan Hatta yang lemah dan yang mudah diserang, dan akan kebutuhan bagi keduanya untuk meninggalkan sebuah testamen yang menunjuk kepada siapa pimpinan revolusi dan negara Indonesia akan dipercayakan. Wasiat ini memuat nama-nama Tan Malaka, Syahrir, Wongsonegoro, dan Iwa Kusumasumantri. Kelompok-kelompok lain hanya menginginkan Syahrir dan Amir Syarifudin untuk mengambil alih pimpinan Komite Nasional Pusat tanpa menggeser Sukarno dan Hatta. Diputuskan bahwa diperlukan suatu

pimpinan yang lebih efektif, dan sesudah diskusi singkat dan penolakan usul untuk membentuk sebuah Direktorium yang terdiri dari tiga orang, maka Komite Nasional Pusat sepakat untuk mendirikan sebuah panitia kerja yang akan berkerja bersama sebuah kabinet parlementer yang bertanggungjawab kepada Komite Nasional Pusat. Kemudian Wakil Presiden Hatta menunjuk Syahrir sebagai formatur pemerintah parlementer yang pertama.

Tahap kedua menganggap suatu pengumuman manifesto politik dan anjuran Panitia Kerja dari Komite Nasional Pusat kepada masyarakat umum agar membentuk partai politik sebagai sarana pelengkap yang diperlukan untuk suatu sistem demokrasi parlementer. Perkembangan ini sering dijelaskan sebagai suatu tindakan taktis saja untuk mempertinggi kredibilitas pemerintah Indonesia sebagai mitra yang pantas dalam perundingan. Penjelasan demikian memperkecil dinamika internal di balik peristiwa khusus tersebut. Pengalaman pahit di masa pendudukan militer Jepang telah menimbulkan suatu sentimen anti-fasis dan anti-feodal yang kuat pada waktu itu, maupun suatu keinginan akan pendekatan yang lebih demokratis yang bersih dari noda kolaborasi dengan Jepang. Juga pada waktu itu ada perasaan kuat bahwa adalah penting untuk menjamin keterlibatan dan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat sebanyak mungkin dalam spektrum politik Indonesia yang bermacam-macam ragamnya, sebagai

sarana untuk memperluas landasan dukungan bagi revolusi. Partisipasi politik sepenuhnya dari berbagai kelompok minoritas di Indonesia akan membuka mata kepada Belanda bahwa periode ketika mereka dapat mengadu-domba satu kelompok terhadap yang lain telah berlalu. Jika perkembangan demikian selama Revolusi Indonesia hanya merupakan sebuah siasat saja untuk bisa berunding, maka sistem multi partai ini dan iklim perdebatan yang bersemangat maupun konflik politik yang sering terbuka tidak akan hidup lebih lama daripada masa Revolusi saja. Pada waktu itu memang ada, dan masih terus ada, suatu nada demokratis dan keterbukaan terhadap dunia luar di kalangan pergerakan kebangsaan, meskipun mengalami pasang surut dalam tahun-tahun kemudian dalam sejarah Indonesia. Gerakan ke arah demokrasi parlementer di masa awal Revolusi Indonesia merupakan suatu pilihan, bukan dari satu orang saja tetapi dari sejumlah kelompok, masing-masing mengejar cita-cita mereka sendiri dan terus mengejarnya dalam konteks suatu sistem demokrasi parlementer. Jadi tindakan itu merupakan pilihan kolektif, didukung oleh Komite Nasional Pusat, Wakil Presiden Hatta dan pada tahap kemudian oleh Presiden Sukarno, dalam suasana yang menjadikan perkembangan demikian menguntungkan juga dilihat dari sudut pandangan strategi perundingan.

Adalah di luar jangkauan makalah ini untuk menganalisa sebab musabab dari kegagalan demokrasi parlementer di Indo-

nesia pada masa kemudian. Cukuplah untuk mengatakan bahwa perkembangan ini merupakan suatu kombinasi dari kegagalan dalam negeri untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang mendasar tentang hakekat negara dan tentang pembangunan ekonomi, dan juga kegagalan untuk mendamaikan perdebatan parlementer dengan kebutuhan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, dan di lain pihak, juga sikap keras kepala pada pihak Belanda yang selalu menolak suatu penyelesaian yang bisa diterima dalam masalah Irian Barat. Kesemuanya ini menjurus ke suatu radikalisasi dalam politik Indonesia dan kepada keputusan Sukarno pada tahun 1958 untuk mengobarkan kembali Revolusi liwat Demokrasi Terpimpin. Adalah suatu ironi bahwa tindakan ini merupakan suatu pilihan yang dapat dibuatnya dalam suasana pembatalan unilateral oleh Indonesia dari Uni Indonesia-Belanda, pembatalan yang tidak pernah diberikan instruksi secara eksplisit oleh Sukarno.

Dua Konsep Tentang Revolusi

Adalah mungkin untuk membedakan dua konsep yang berlainan tentang revolusi yang ditunjukkan oleh dua pelakunya yang utama, Syahrir dan Sukarno. Keduanya menyadari bahwa sebuah revolusi merupakan pembebasan dahsyat dari kekuatan-kekuatan sosial, dan suatu akselerasi sejarah yang disertai

emosi yang berapi-api. Bagi Syahrir kekuatan yang dahsyat ini mengandung potensi besar baik yang bersifat kreatif maupun destruktif. Adalah tugas pemimpin revolusi untuk menggalang kekuatan itu dan mengarahkannya ke tujuan-tujuan yang demokratis dan humanistik liwat pranata-pranata yang demokratis, dan juga liwat suatu perjuangan melawan dampak indoktrinasi fasis militer, terutama di kalangan kaum muda. Ketika dukungan parlementer terhadapnya runtuh dalam menghadapi tuntutan-tuntutan baru dari pihak Belanda, maka Syahrir tidak bersedia lagi menduduki tampuk kekuasaannya walaupun didesak dari berbagai pihak. Ia menganggap sikapnya ini penting bagi suatu pertumbuhan demokrasi di Indonesia dan ia siap menanggung akibat dari suatu kekalahan parlementer.

Di pihak lain, tatkala Sukarno mendesak saya untuk masuk gelanggang politik, ia mengemukakan sebagai salah satu syarat bahwa saya hendaknya jangan bergabung dengan Partai Sosialis. Ketika ditanya apa salahnya partai itu, jawabnya: "Tak ada apa-apa dengan Partai Sosialis. Tetapi kita berada dalam revolusi; adalah terlalu dini untuk memikirkan masalah demokrasi dan hak-hak asasi." Dalam suatu rangkaian percakapan pribadi ia menjelaskan pandangannya tentang revolusi. Ia berkata: "Revolusi adalah bagaikan kuda yang terlepas. Kuda demikian mencari jalannya sendiri. Tugas seorang pemimpin revolusi adalah hanya

untuk tetap duduk di atas pelananya sampai kuda itu telah selesai berlari. Baru sesudah itu ia bisa menggiringnya ke arah yang dikehendaki." Ketika saya tanyakan tentang bahayanya jika pemimpin itu dilempar jatuh dari pelananya, ia menyahut: "Itulah risiko yang harus diambil seorang pemimpin dalam revolusi." Kita di sini bisa mendengar gema suatu romantika revolusioner, suatu determinisme historis, malahan ucapan Trotsky: "Tak boleh ada musuh di sebelah Kiri." Dan memang Sukarno merasakan kebutuhan, sepanjang revolusi kedua dari tahun 1958 sampai 1965, untuk lebih revolusioner daripada siapa pun. Tetapi betapa pun juga, baik Sukarno maupun Syahrir sependapat tentang keutamaan dari tujuan kebangsaan dalam revolusi nasional pada tahun 1945.

Kali terakhir saya bertemu dengan Sukarno adalah pada akhir tahun 1966 ketika kekuasaannya sedang menurun setelah gagal untuk "mengamankan revolusi", dan ketika Indonesia telah bergabung kembali dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sewaktu saya kembali dari Majelis Umum PBB beliau menanyakan evaluasi saya tentang revolusi kebudayaan di negeri Cina. Sesudah memberikan pandangan saya, saya menanyakan mengapa ia bertanya demikian. Beliau menjawab: "Kalau Mao Tse-tung menang, bagi saya berarti bahwa era Revolusi Agung belum berlalu, dan saya menarik kekuatan besar dari [kenyataan] ini."

Sebelum mengakhiri makalah ini perkenankan saya menu-
turkan kembali sebuah keputusan yang amat penting di mana
keterlibatan saya bahkan lebih marjinal lagi daripada dalam
peristiwa lainnya. Pada waktu aksi militer Belanda yang
kedua telah menggeser Sukarno, Hatta dan Syahrir untuk
sementara waktu dari pentas utama, dan Republik berada
pada suatu keadaan yang sangat rawan, Sultan Yogyakarta
memainkan peranan kunci dalam mempertahankan Republik Indo-
nesia dengan sikapnya yang bersikeras untuk tidak mengga-
bungkan diri ke pihak Belanda. Sebaliknya, beliau memerin-
tahkan suatu upaya untuk kembali menduduki Yogya tepat
pada waktu bersamaan dengan diselenggarakannya sidang Dewan
Keamanan di Paris yang membicarakan masalah Indonesia pada
tahun 1949. Letnan kolonel Soeharto lah yang memimpin
upaya ini dan berhasil menduduki Yogya selama enam jam
pada tanggal 1 Maret. Saya pada waktu itu adalah anggota
delegasi Indonesia ke Dewan Keamanan, dan ketika berita
ini disampaikan liwat telegram dari kantor kami di Singa-
pura, saya langsung mengadakan konperensi pers yang berhasil
menggali lobang yang agak besar dalam pernyataan yang dibe-
rikan oleh delegasi Belanda tak lama sebelumnya, yakni
bahwa tentara Belanda telah berkuasa penuh dan Republik
Indonesia sudah tidak ada lagi. Jelaslah bahwa jika Sultan
tidak teguh pada komitmen beliau sebagai seorang republikein
nasionalis, maka sejarah Indonesia mungkin akan menempuh
jalan yang agak lain.

Sejumlah pilihan lain yang sangat penting telah dibuat pada tahun 1940-an. Saya hanya membatasi diri pada pilihan-pilihan yang saya ketahui secara pribadi. Misalnya, pilihan antara revolusi sosial atau keutamaan tujuan kebangsaan yang telah dibuat di masa awal revolusi, mungkin tidak begitu disebabkan oleh keputusan yang sadar maupun oleh kemungkinan bahwa nanti akan terjadi kekacauan justru pada waktu pemerintah revolusioner masih harus membuktikan kewibawaannya dalam mempertahankan hukum dan ketertiban sementara menghadapi kedatangan tentara Sekutu. Dalam hal ini Sukarno, Hatta dan Syahrir bersepakat. Sambil menoleh ke belakang ke berbagai titik artikulasi dalam sejarah pergerakan kebangsaan pada tahun 1940-an, kita tiba pada kesadaran betapa sejarah itu tak ada batas akhirnya, bahkan sejarah revolusi pun, dan betapa lemahnya wawasan tentang determinisme sejarah. Dalam upaya kita untuk memahami keadaan historis kita, yang hanya bisa dilihat adalah kecenderungan-kecenderungan umum saja, dan kita berusaha untuk memahami apa yang agaknya merupakan makna penting dari ciri-ciri dominan dari zaman kita. Tetapi dalam sejarah tak seorang pun yang bisa memastikan konsekuensi jangka panjang dari sebuah pilihan, karena kesudahannya tidak bisa diramalkan. Ini berlaku pula bagi pilihan akhir yang harus kita buat: menggabungkan diri kepada apa yang rupanya menjadi alur utama dari sejarah, atau memilih tempat di salah satu alur lawan

atau di suatu lintasan kecil dari sejarah. Kepastian dan ketenteraman terakhir tak akan ditemukan dalam salah satu pilihan tersebut, dan kiranya demikianlah, kita hanya bisa membuat pilihan berdasarkan keyakinan dan nilai-nilai yang ada pada diri sendiri, dan dalam segala kerendahan hati kita.

Tokyo-Jakarta, 2 September 1987